

STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DESA. STUDI KASUS: DESA CIBURIAL, KECAMATAN CIMENYAN, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT.

STRATEGIES FOR INCREASING COMMUNITY PARTICIPATION IN THE PLANNING OF VILLAGE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs). CASE STUDY: CIBURIAL VILLAGE, CIMENYAN DISTRICT, BANDUNG REGENCY, WEST JAVA

Muhammad Rezqy Kurniawan¹, Rike Anggun Artisa²

Politeknik STIA LAN Bandung

¹mrezqik30@gmail.com, ²rikeanggunartisa@gmail.com

Dikirim 5 Januari 2023, Direvisi 12 Februari 2023, Disetujui 28 Maret 2023

Abstrak: *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan program untuk mewujudkan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa di Desa Ciburial sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 Desa Ciburial melaksanakan kembali program SDGs Desa, akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat masalah yang sama, yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam SDGs Desa dan merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan SDGs Desa dapat berjalan dengan optimal. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan mengambil data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan SDGs Desa akan menggunakan analisis SWOT, analisis SWOT ini akan memaparkan kondisi internal dan eksternal mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada untuk menentukan strategi yang dapat membuat masyarakat desa berperan aktif terhadap SDGs Desa yang akan dijalankan oleh Pemerintah Desa Ciburial.

Kata kunci: Partisipasi, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan Desa, Strategi, SWOT

Abstract: *Village Sustainable Development Goals* (SDGs) program to realize the acceleration of achieving sustainable development goals. The Village SDGs in Ciburial Village have been implemented in 2021 and 2022 Ciburial Village will re-implement the Village SDGs program, but in practice, there are still the same problems, namely the lack of community participation in the program. This study aims to determine the level of community participation in the Village SDGs and formulate appropriate strategies to increase community participation so that the implementation of the Village SDGs can run optimally. The method used in this research is descriptive qualitative by taking data through interviews, observation, and documentation. In formulating a strategy to increase community participation in the implementation of the Village SDGs, a SWOT analysis will be used, this SWOT analysis will describe internal and external conditions regarding existing strengths, weaknesses, opportunities, and threats to determine strategies that can make village communities play an active role in the Village SDGs that will be implemented. run by the Ciburial Village Government.

Keywords: *Community Participation, Participation, Village Sustainable Development, Strategi, SWOT*

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang berisikan tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yang di lokalkan ke dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes),

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan tersebut menyatakan bahwa SDGs Desa merupakan upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam setiap desa yang ada di

Indonesia, dengan tujuan untuk mewujudkan delapan belas poin SDGs Desa.

Berikut delapan belas (18) poin SDGs Desa:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan desa berkualitas;
5. Keterlibatan perempuan desa;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8. Pertumbuhan ekonomi desa merata;
9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman;
12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan;
13. Desa tanggap perubahan iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkeadilan;
17. Kemitraan untuk pembangunan desa;
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Terlepas dari delapan belas poin SDGs Desa di atas, adapun hal-hal yang harus dilakukan setiap desa untuk merealisasikan SDGs Desa, di antaranya:

1. Pendataan desa;
2. Perencanaan pembangunan desa;
3. Pelaksanaan pembangunan desa; dan
4. Pertanggungjawaban pembangunan desa.

Keempat elemen tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya pun pemerintah desa harus mempertimbangkan hasil yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa, mengingat prinsip SDGs Desa itu sendiri *“No One Left Behind”* (Patiung, 2019). Hal ini yang menjadi tantangan setiap desa yang akan mempersiapkan pelaksanaan SDGs Desa.

Berdasarkan paragraf di atas, kesuksesan pelaksanaan SDGs Desa pada dasarnya bukan hanya sebatas peran yang dilakukan pemerintah desa dalam

membangun pembangunan berkelanjutan di desanya, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi desa. Sebagaimana dikutip dari Sisk (2002), bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya penting bagi pemerintahan, karena partisipasi itu sendiri merupakan bagian inti dari makna hakiki demokrasi. Pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam SDGs Desa itu sendiri sudah terlihat jelas dari keseluruhan elemen dalam merealisasikan SDGs Desa, terutama pada tahap awal dalam implementasi, yakni pendataan SDGs Desa.

Pendataan SDGs Desa merupakan langkah awal dalam merealisasikan pembangunan berkelanjutan. Pendataan tersebut memiliki indikator serta langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun, pada saat pendataan SDGs Desa, seringkali menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi di desa-desa yang sedang mencoba melaksanakan program SDGs Desa. Permasalahan tersebut berkaitan dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pemerintah desa dan keikutsertaan partisipasi masyarakat di dalamnya. Pelaksanaan pendataan SDGs desa diperlukan keikutsertaan masyarakat desa sesuai dengan ketetapan Kemendes mengenai pemberdayaan masyarakat desa karena proses tersebut akan sulit dilakukan oleh perangkat desa saja. Tidak semua desa yang ada di Indonesia memiliki SDM yang mencukupi. Selain itu, terdapat tugas pokok yang harus dikerjakan oleh para perangkat desa mengingat pelaksanaan pendataan SDGs Desa bukanlah kegiatan yang dapat selesai dalam waktu yang singkat. Keterbatasan jumlah SDM dan tingginya beban perangkat desa inilah yang menyebabkan perlunya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendataan.

Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan merupakan desa yang berada di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Desa tersebut memiliki luas wilayah sebesar 599,612 Ha dengan total penduduk sebanyak 13.403 yang terdiri dari 12 RW dan 51 RT yang tersebar di 4 dusun berbeda.

Di setiap dusun tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan tersendiri. Desa Ciburial ini juga termasuk desa yang berprestasi karena memiliki banyak pencapaian yang diakui oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, salah satunya ialah juara satu Jabar Juara Award 2020.

Desa Ciburial ini pernah melaksanakan SDGs Desa, lebih tepatnya pada tahun 2021. Keikutsertaan Desa Ciburial ini terhadap pelaksanaan SDGs Desa didasari oleh ketetapan Permendesa Nomor 13 Tahun 2020, yang di dalamnya membahas mengenai amanat tentang pelaksanaan SDGs Desa. Ketetapan yang baru berupa amanat membuat Pemerintah Desa Ciburial ini tidak segera melaksanakan SDGs Desa terutama mengenai pendataan. Namun, pada bulan April tahun 2021, Kementerian Desa (Kemendesa) mengeluarkan penegasan bahwa setiap Desa di Indonesia harus melaksanakan pendataan SDGs Desa yang tertuang dalam Surat Edaran Kemendesa PDTT RI No 31/PRI.00/IV/2021 tentang penegasan pemutakhiran data indeks desa membangun (IDM) berbasis SDGs Desa. Di dalamnya terdapat penegasan bahwa pelaksanaan harus sampai dengan tanggal 31 Mei.

Ketetapan Permendesa Nomor 13 Tahun 2021 ini sebenarnya sudah diberlakukan di Desa Ciburial dan tertuang pada APB Desa. Namun, kurangnya pemahaman tentang SDGs Desa menjadikan ketetapan tersebut belum diimplementasikan dengan optimal dan ketika penegasan pemutakhiran data IDM berbasis SDGs Desa di keluarkan. Hal tersebut menjadikan pelaksanaan pendataan SDGs Desa Ciburial pada tahun 2021 menjadi hanya sekedar formalitas saja. Pelaksanaan pendataan baru melibatkan 1 RW saja dari 12 RW yang ada di Desa Ciburial.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian, diketahui bahwa dalam pelaksanaan pendataan SDGs Desa yang dilakukan pada 1 RW saja, dengan rincian jumlah individu yang didata sebanyak 1.374. Desa Ciburial ini hanya melakukan penginputan data secara langsung melalui

aplikasi pusat pendataan SDGs Desa tanpa ada tindak lanjut dari pendataannya tersebut. Hal ini terjadi karena singkatnya jangka waktu yang diberikan dari pemerintah melalui surat edaran yang diterima oleh Desa Ciburial, yaitu hanya satu bulan saja. Menjadikan pelaksanaan SDGs Desa pada tahun tersebut sangat jauh dari esensi pembangunan berkelanjutan. Hakikat partisipasi masyarakat pun belum teroptimalkan dalam SDGs Desa pada tahun 2021.

Rasa ketidakpuasan pihak pemerintah Desa Ciburial terhadap pelaksanaan SDGs Desa terutama pada pendataan SDGs Desa sangat terasa. Rasa ketidakpuasan inilah yang mendasari pemerintah Desa Ciburial untuk merencanakan kembali pelaksanaan SDGs Desa dalam hal pendataan SDGs Desa pada tahun 2022. Atas dasar tersebut terdapat perbedaan dalam pelaksanaan SDGs Desa di tahun 2022 dari tahun sebelumnya (2021), yakni pemerintah Desa Ciburial menargetkan bukan hanya 1 RW saja, melainkan juga keseluruhan RW (12 RW) yang ada di Desa Ciburial. Target sebanyak 12 RW tersebut akan memerlukan jumlah SDM yang cukup banyak. Kebutuhan akan SDM inilah yang membuat partisipasi masyarakat menjadi penting dalam merealisasikan SDGs Desa ini.

Dalam merealisasikan pendataan SDGs Desa, diperlukan strategi agar pendataan dapat dilakukan secara merata terhadap 12 RW yang ada serta adanya cukup SDM pelaksana. SDM yang nantinya ikut serta dalam pendataan SDGs Desa dapat disebut relawan pemutakhiran data SDGs Desa. Hasil dari pengamatan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ciburial ini belum memiliki strategi dalam pelaksanaan pendataan SDGs Desa. Meskipun demikian, Desa Ciburial sudah memiliki rencana target jumlah SDM yang diperlukan dalam pelaksanaan pendataan SDGs Desa yakni sebanyak 52 orang yang nantinya akan dibagi menjadi 2 orang per 1 RW. Rencana target jumlah SDM yang diperlukan juga menjadi salah satu masalah tambahan bagi pemerintah Desa Ciburial

karena sampai saat ini jumlah relawan pemutakhiran data SDGs Desa belum terpenuhi.

Tidak terpenuhinya relawan pemutakhiran data tersebut dapat menjadi suatu masalah dalam melaksanakan SDGs Desa pada tahun ini. Hal inilah yang perlu diteliti agar dapat mengetahui mengapa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pendataan SDGs Desa belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, upaya peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Ketika terdapat banyak keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan tersebut, akan muncul ide atau strategi untuk mempermudah pelaksanaan pendataan SDGs Desa di Desa Ciburial. Keikutsertaan masyarakat desa dalam pelaksanaan tersebut secara tidak langsung akan memberikan pemahaman mengenai potensi yang dimiliki desanya dan mempermudah untuk melanjutkan ke tahap berikutnya pada pelaksanaan SDGs Desa serta dapat merealisasikan SDGs Desa yang berpartisipasi.

Selain temuan di atas, diketahui bahwa Desa Ciburial memiliki banyak pencapaian dan tergolong desa yang berprestasi, hal inilah yang membuat peneliti menjadi tertarik pada Desa Ciburial ini. Walaupun Desa Ciburial ini merupakan desa yang berprestasi akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan, salah satunya tentang SDGs Desa. Bagaimana untuk memecahkan permasalahan tersebut inilah yang menjadi tantangan bagi peneliti dan menjadi kebanggaan tersendiri jika penelitian yang dilakukan dapat membantu memecahkan masalah tersebut. Didasari hal tersebut yang membuat peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan mengangkat topik “Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa”.

Pada penelitian ini, peneliti mencari topik masalah yang perlu dikaji, seperti bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa terkait perencanaan SDGs Desa, peran

apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa, serta bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan SDGs Desa di Desa Ciburial dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat desa terkait perencanaan SDGs Desa, untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa terkait partisipasi masyarakat dan perencanaan SDGs Desa, dan untuk mengetahui serta memberikan strategi yang tepat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan SDGs Desa di Desa Ciburial. Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep ilmu administrasi khususnya pada program studi administrasi pembangunan negara dan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian di bidang SDGs Desa, serta dapat memberikan kontribusi nyata untuk pemecahan masalah di Desa Ciburial terhadap metode strategis peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan SDGs Desa.

LANDASAN TEORI

A. *Konsep Perencanaan*

Perencanaan menurut Khairuddin dalam (Bahua, 2018) merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu, sehingga pada hakikatnya perencanaan merupakan setiap jenis usaha manusia. Adapun menurut (Sa'id dan Intan, 2000), perencanaan merupakan kerangka penyusunan program kerja yang bersifat umum maupun spesifik, berdasarkan batasan waktu, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

B. *Konsep Strategi*

Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Sebagaimana menurut pendapat (Chandler, 1962), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan ataupun instansi dalam

kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Konsep strategi ini dibagi menjadi dua, yakni:

A. *Distinctive Competence*

Merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun instansi agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Pada konsep ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi yakni keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya.

B. *Competitive Advantage*

Merupakan kegiatan spesifik yang dikembangkan perusahaan ataupun instansi agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya.

C. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Desa*

SDGs Desa merupakan pelokalan dari SDGs, sementara SDGs itu sendiri bermula pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada saat itu, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan pembangunan global, dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”. SDGs ini sendiri dirancang secara partisipatif dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan agar dapat berkontribusi bersama dalam merealisasikan tujuan serta target SDGs ini sendiri.

SDGs ini memiliki prinsip yaitu “Tidak Meninggalkan Satu Orang pun (*Leave No One Behind*)” (Patiung, 2019). Dengan prinsip ini, SDGs mampu untuk mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substansial. Keadilan prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Keadilan *substansial* merupakan sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat.

Konsep pengembangan SDGs ini sendiri berpijak pada tiga pilar utama, yaitu: pertama, pembangunan manusia, seperti pendidikan dan kesehatan; kedua, lingkungan sosial ekonomi, seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; ketiga, lingkungan, berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Artinya, SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan.

Di Indonesia pembangunan berkelanjutan atau SDGs tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang berisikan tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Merujuk dari Peraturan Presiden di atas disusunlah kebijakan tentang SDGs Desa melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan tersebut menyatakan bahwa SDGs Desa merupakan upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika dijelaskan secara singkat, SDGs Desa merupakan pembangunan total atas desa.

Penambahan lokus Desa ke dalam implementasi SDGs itu sendiri merupakan salah satu strategi untuk memastikan substansi dan proses pembangunan ada di suatu wilayah atau sekelompok masyarakat. Penyesuaian atau biasa disebut pelokalan SDGs ini bertujuan untuk mempermudah penafsiran SDGs itu sendiri. Penjelasan lebih mendetail mengenai pelokalan SDGs dapat di akses pada website SDGs desa (<https://sdgsdesa.kemendes.go.id>).

D. *Konsep Partisipasi*

Pengertian partisipasi menurut (Pasaribu, 1982) dalam (Irawan & Sunandar, 2020), ialah keikutsertaan yang diberikan oleh masyarakat yang berpartisipasi. Adapun

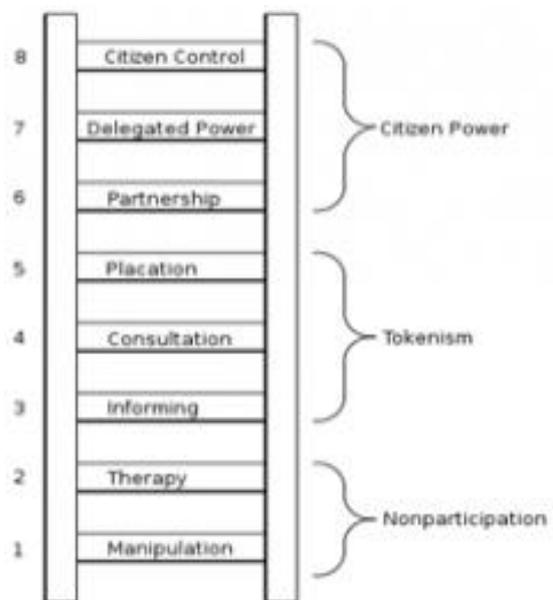
pendapat (Adisasmita, 2006) mengenai partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya penting bagi pemerintahan, karena partisipasi itu sendiri merupakan bagian inti dari makna hakiki demokrasi, (Sisk, n.d., 2002). Adapun menurut (Adisasmita, 2006), pentingnya kedudukan anggota masyarakat tersebut dapat diartikan pula bahwa anggota masyarakat harus diajak untuk berperan secara lebih aktif, didorong untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat, dalam menyusun perencanaan dan dalam implementasi program/proyek. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa anggota masyarakat:

- a. Mereka mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya/kebutuhan mereka;
- b. Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya;
- c. Mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian di masyarakat;
- d. Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi;
- e. Mereka mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan masyarakatnya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan kewaspadaan yang kuat mampu mengurangi dan bahkan menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

Menurut Chapin dalam (Sutami, 2009) , dalam partisipasi masyarakat terdapat indikator penilaian tingkat partisipasi masyarakat, di antaranya sebagai berikut: keanggotaan dalam organisasi atau lembaga tersebut, frekuensi kehadiran dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan, kegiatan yang diikuti dalam tahap program yang direncanakan, dan keaktifan dalam diskusi pada setiap pertemuan yang diadakan.

Menurut Arnstein (Rosyida et al., 2011), partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*Citizen Participation is Citizen Power*). Partisipasi masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan, serta Partisipasi masyarakat dapat diukur berdasarkan Teori Arnstein dalam (Dzulhijiana Atika, 2015), yang menjelaskan delapan tingkatan partisipasi masyarakat yaitu: manipulasi, terapi, informasi, konsultasi, peredaman, kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan masyarakat. Teori ini dijadikan sebagai dimensi untuk mengukur tingkatan partisipasi masyarakat. Tingkatan partisipasi masyarakat dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Tangga Partisipasi Arnstein

Gambar tersebut dapat diartikan bahwa manipulasi dan terapi dapat dilihat sebagai tidak adanya kerjasama masyarakat dalam segala bentuk perencanaan pembangunan. Pemberitahuan dan konsultasi merupakan keadaan yang memungkinkan untuk adanya bentuk partisipasi masyarakat tetapi tidak ada jaminan bahwa pendapat yang diberikan dapat diterima atau ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Pada tahap ini, pemerintah telah memberikan persetujuan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi proses pengambilan keputusan dikendalikan oleh pemerintah setingkat ataupun di atasnya. Kemitraan, pada tahap ini masyarakat mampu bernegosiasi dan berkompromi dengan pihak yang berkuasa. Tingkat paling tinggi adalah pendelegasian kekuasaan dan kontrol masyarakat, masyarakat menjadi peran paling penting dalam pengambilan keputusan ataupun dalam partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dan akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil.

Adapun penjelasan terkait tabel di atas mengenai delapan tingkatan/tangga partisipasi menurut teori Arnstein (Reka Lingkungan, 2018), sebagai berikut:

1. *Citizen Control*

Inisiasi sepenuhnya datang dari masyarakat baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, tanggung jawab, pembiayaan, dan pemeliharaan.

2. *Delegated Power*

Inisiasi sudah datang dari masyarakat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, tanggung jawab, dan pemeliharaan dengan minta bantuan dari pihak terkait .

3. *Partnership*

Inisiasi sudah datang dari masyarakat tetapi pada perencanaan masih dibantu oleh pihak kerkait dengan adanya kesamaan peran.

4. *Placation*

Masyarakat sudah melakukan kegiatan di atas secara sukarela, sudah mengetahui manfaatnya, sudah ada keinginan untuk berpendapat, dan masyarakat sudah dipersilahkan menyampaikan usulan mengenai hal tersebut, tetapi hanya sebagian pendapat yang diterima.

5. *Consultation*

Masyarakat sudah melakukan kegiatan di atas secara sukarela, sudah mengetahui manfaatnya, dan masyarakat dapat membuat usulan mengenai hal tersebut, walaupun ada jaminan tidak diterima.

6. *Informing*

Masyarakat sudah mendapatkan informasi mengenai manfaat dari kegiatan, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat.

7. *Therapy*

Masyarakat melakukan kegiatan karena terpaksa dan sudah mengetahui manfaatnya.

8. *Manipulation*

Masyarakat melakukan kegiatan karena terpaksa dan tidak mengetahui manfaatnya.

Adapun cara pengukuran pada teori ini dapat dilakukan secara kualitatif dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh melalui instrumen penelitian. Cara pengukurannya didasari dari tiga aspek pembahasan, yakni pengetahuan, manfaat, dan kehadiran yang dapat di jabarkan pada gambar berikut ini:

Level	Pengetahuan	Manfaat	Kehadiran
<i>Citizen Control</i>	Tahu	Tahu	Inisiatif hadir
<i>Delegated Power</i>	Tahu	Tahu	Inisiatif hadir
<i>Partnership</i>	Tahu	Tahu	Inisiatif hadir
<i>Placation</i>	Tahu	Tahu	Sukarela
<i>Consultation</i>	Tahu	Tahu	Sukarela
<i>Informing</i>	Tidak tahu	Tahu	Sukarela
<i>Therapy</i>	Tidak tahu	Tahu	Terpaksa
<i>Manipulation</i>	Tidak tahu	Tidak tahu	Terpaksa

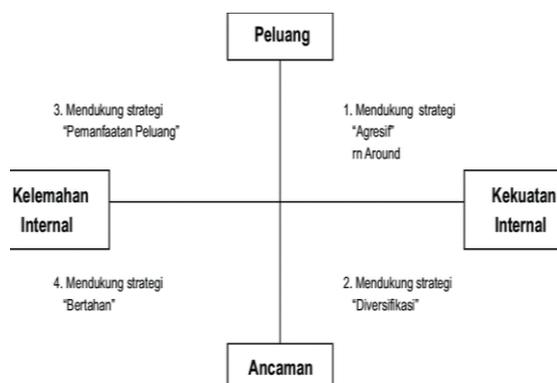
Gambar 2. Pengukuran Tangga Partisipasi Arnstein

Berdasarkan konseptualisasi di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa

partisipasi merupakan hal yang berkaitan dengan koneksi atau kerjasama dari seseorang dalam melakukan suatu hal. Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses dukungan, keterlibatan, dan kesatuan warga, baik sebagai individu atau perkumpulan berdasarkan kesadaran sendiri setiap individu, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa paksaan pihak tertentu dan peningkatan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintahan suatu negara maupun daerah dan bagi peneliti peningkatan partisipasi masyarakat itu sendiri dapat diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat, yaitu usaha salah satu kelompok kepentingan atau biasanya dilakukan oleh pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki rasa inisiatif yang tinggi dalam melibatkan dirinya pada suatu kegiatan ataupun persoalan.

E. Konsep Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (Kurniasih et al., 2021). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Pada analisis SWOT terdapat diagram analisis SWOT yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Diagram SWOT

Penjelasan mengenai gambar di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kuadran 1: Merupakan situasi yang sangat menguntungkan.

Pada kuadran ini strategi yang harus ditetapkan adalah strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

2. Kuadran 2: meskipun menghadapi berbagai ancaman, akan tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi yang harus ditetapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.

3. Kuadran 3: memiliki peluang akan tetapi harus menghadapi kelemahan pada internal.

Strategi yang harus ditetapkan adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

4. Kuadran 4: merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, strategi yang harus diterapkan adalah meminimalisasi kelemahan dan ancaman yang dimiliki tersebut.

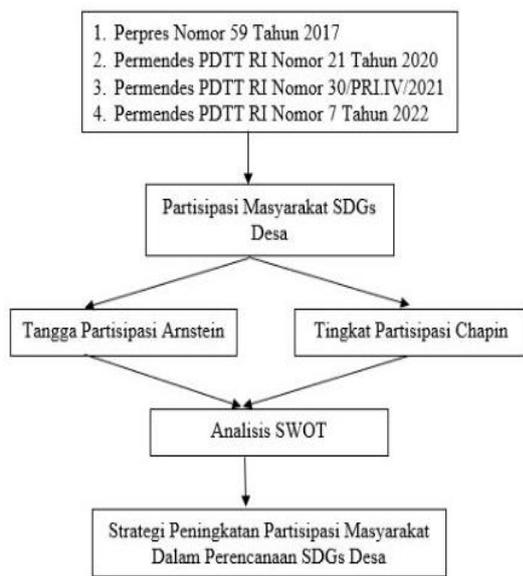
Perencanaan pembangunan analisis SWOT ini ditujukan untuk menemukan faktor-faktor eksternal dan internal dalam penyusunan rencana selama ini. Hasil yang akan diperoleh nantinya dijadikan bahan masukkan untuk menyusun strategi perencanaan. Hasil analisis SWOT tersebut menggambarkan secara jelas faktor internal maupun eksternal dan dapat dirumuskan empat alternatif strategi pada strategi TOWS.

Strategi TOWS merupakan lanjutan dari analisis SWOT yang mengkombinasikan unsur kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman menjadi empat strategi yaitu: SO, WO, ST, dan WT. Adapun langkah selanjutnya menggunakan penyusunan menggunakan matriks IFAS dan EFAS. Matriks ini bertujuan untuk menentukan strategi yang lebih berpeluang berhasil dari 4 (empat) strategi TOWS yang dihasilkan

yakni SO, WO, ST, atau WT sesuai dengan penjelasan di atas tentang diagram SWOT.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan SDGs desa pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, hal ini yang membuat partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan SDGs Desa dapat memaksimalkan hasil yang diinginkan serta akan bermanfaat kepada masyarakat itu sendiri.



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran
 Diolah oleh Peneliti (2022)

Gambar 4. Kerangka Pemikiran

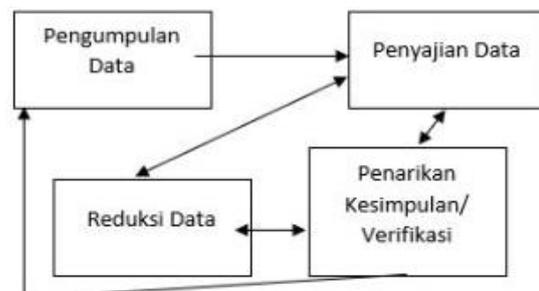
METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, tujuan dari metode kualitatif deskriptif ini untuk menguraikan dan menganalisis atas suatu peristiwa, fakta, realita, kejadian, aktivitas, keterlibatan manusia, tingkah laku, dan persepsi yang berbeda. Dalam pengumpulan data, dibagi menjadi dua, yakni primer dan sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dari wawancara dan observasi. Sedangkan sekunder didapatkan dari data yang diperoleh melalui arsip atau berkas desa, serta adapun data yang diperoleh dari dokumen tertulis, karya ilmiah, dan buku

ataupun catatan tertulis yang sesuai dengan objek penelitian.

Pada penelitian ini dalam menentukan informan penelitian menggunakan teknik *snowball*, yang dapat diartikan pada penelitian ini dalam memilih sumber informasi dimulai dari sedikit informan kemudian terus bertambah informannya seiring berjalannya waktu sampai informan yang diperlukan dalam penelitian ini tercukupi (Yusuf, 2015). adapun dalam uji keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yakni triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis data Model Miles dan Huberman atau biasa disebut Model Interaktif yang terdiri dari: (1) Reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) Kesimpulan. Yang nanti pada prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.



Gambar 5. Teknik Analisis Data Model Interaktif

Selain menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, pada penelitian ini data akan dianalisis menggunakan analisis SWOT (Rahmawati, 2020). Pada Analisis SWOT ada beberapa tahapan dalam penyusunan perencanaan strategis, yakni tahapan pengumpulan data, tahapan analisis, dan tahapan pengambilan keputusan. Dalam memproses ketiga tahapan tersebut dapat dijelaskan pada pembahasan di bawah ini:

1. Pengumpulan data merupakan proses awal untuk mengetahui kekuatan (*Strengths*), peluang (*opportunities*), kelemahan (*weaknesses*), dan ancaman

(*threats*) yang dimiliki pemerintah Desa Ciburial. Pada tahap ini dapat dibuat tabel seperti berikut:

Tabel 1. Analisis SWOT

Internal	Kekuatan (Faktor-faktor kekuatan)	Kelemahan (Faktor-faktor kelemahan)
Eksternal	Peluang (Faktor-faktor peluang)	Ancaman (Faktor-faktor Ancaman)

2. Tahap kedua yakni tahap analisis, pada tahap ini peneliti menyebutnya perumusan strategi TOWS. Berikut bentuk tabel strategi TOWS:

Tabel 2. Strategi TOWS

Internal	Kekuatan	Kelemahan
Eksternal	(<i>Strenghts</i>)	(<i>Weaknesses</i>)
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Strategi SO (<i>Comparative Advantage</i>) Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO (<i>Divestment/ Investment</i>) Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi ST (<i>Mobilization</i>) Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT (<i>Damage Control</i>) Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

3. Tahap ketiga ialah tahap pengambilan keputusan, pada tahap ini dapat dilakukan dengan membuat diagram SWOT untuk menentukan perencanaan strategis yang lebih berpotensi berhasil dari rumusan strategi TOWS yang sudah dibuat. Pada tahap ini memerlukan perumusan matriks IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) dan EFAS (*Eksternal Strategic Factors Analysis Summary*). Langkah awalnya ialah mengidentifikasi atau biasa disebut perhitungan bobot dan *rating*. Penentuan bobot didasarkan pada angka 0-1, yaitu akumulasi dari kekuatan dengan

kelemahan dan akumulasi antara peluang dan ancaman. Sedangkan penentuan *rating* berdasarkan tingkat pengaruh faktor tersebut terhadap organisasi. *Rating* dari 1 sampai 4 yang mana nilai 1 (mempunyai pengaruh sangat bagus); 2 (mempunyai pengaruh yang bagus); 3 (mempunyai pengaruh yang cukup); 4 (mempunyai pengaruh yang kecil). Setelah diberikan bobot dan *rating*, bobot dan *rating* tersebut dijumlahkan ($Skor = Bobot \times Rating$). Berikut tabel perumusan matriks IFAS dan EFAS:

Tabel 3. Penyusunan IFAS

No	Isu Strategis	Bobot (a)	Rating (b)	Skor (axb)
Kekuatan				
1	Masukan kekuatan yang dimiliki	Berikan bobot dari 0 - 1	Berikan rating dari 1 - 4	Kalikan bobot dan rating
Total				
Kelemahan				
2	Masukan kelemahan yang dimiliki	Berikan bobot dari 0 - 1	Berikan rating dari 1 - 4	Kalikan bobot dan rating

Tabel 4. Penyusunan EFAS

No	Isu Strategis	Bobot (a)	Rating (b)	Skor (axb)
Peluang				
1	Masukan peluang yang dimiliki	Berikan bobot dari 0 - 1	Berikan rating dari 1 - 4	Kalikan bobot dan rating
Total				
Ancaman				
2	Masukan ancaman yang ada	Berikan bobot dari 0 - 1	Berikan rating dari 1 - 4	Kalikan bobot dan rating

Hasil dari perumusan IFAS dan EFAS seperti pada tabel 3.4 dan tabel 3.5, maka langkah selanjutnya ialah menghitung titik koordinat untuk diagram SWOT. Pada perhitungan ini IFAS menjadi sumbu X dan EFAS menjadi sumbu Y. dalam perhitungannya dapat menggunakan rumus seperti di bawah ini:

a. Titik koordinat IFAS ditentukan dengan menggunakan rumus:

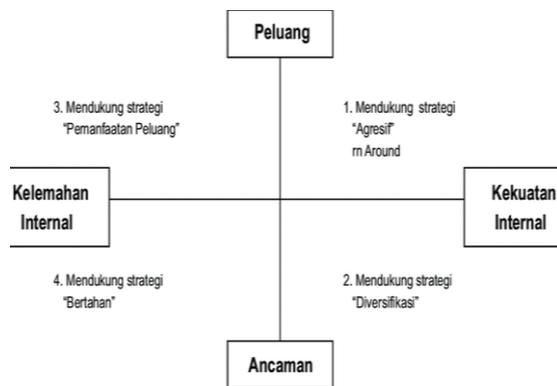
$$\text{Sumbu X} = \frac{\text{Jumlah kekuatan} - \text{Jumlah kelemahan}}{2}$$

b. Titik koordinat EFAS ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Sumbu Y} = \frac{\text{Jumlah peluang} - \text{Jumlah ancaman}}{2}$$

Gambar 6. Rumus Perhitungan Titik Koordinasi IFAS dan EFAS

Hasil dari perhitungan titik koordinat IFAS dan EFAS, maka langkah selanjutnya ialah memasukan hasil perhitungan tersebut ke dalam diagram SWOT untuk mengetahui alternatif perencanaan strategis yang dapat berpeluang baik saat digunakan dalam strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan SDGs Desa di Desa Ciburial.



Gambar 7. Diagram SWOT

Penjelasan mengenai gambar di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kuadran 1: Merupakan situasi yang sangat menguntungkan.

Pada kuadran ini strategi yang harus ditetapkan adalah strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

2. Kuadran 2: meskipun menghadapi berbagai ancaman, akan tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi yang harus ditetapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.

3 Kuadran 3: memiliki peluang akan tetapi harus menghadapi kelemahan pada internal.

Strategi yang harus ditetapkan adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

4 Kuadran 4: merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, strategi yang harus diterapkan adalah meminimalisir kelemahan dan ancaman yang dimiliki tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan lokasi penelitian di suatu desa, lokasi desa tersebut bertempat di Desa Ciburial Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini telah dilakukan dimulai dari bulan Maret Tahun 2022 hingga Agustus Tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran SDGs Desa di Desa Ciburial

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa didasari dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa melalui Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam peraturan tersebut SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan paragraf di atas jika diperhatikan terdapat kalimat "pemberdayaan masyarakat" maka hal ini dapat disimpulkan bahwa SDGs Desa merupakan program yang membutuhkan partisipasi masyarakat di dalamnya untuk mewujudkan 18 poin tersebut.

Partisipasi masyarakat yang disebutkan pada paragraf di atas dapat dikaitkan dengan maksud dan tujuan yang ada pada buku standar operasional prosedur pemutakhiran data SDGs desa mengingat pemutakhiran data SDGs desa ini termasuk salah satu rangkaian dari perencanaan

SDGs Desa. Maksud pemutakhiran data ini berupa pendataan SDGs desa, ialah mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis data dengan tujuan pendataan SDGs desa ialah:

1. Menyusun pokja relawan pendataan desa;
2. Memutakhiran data pada level desa;
3. Memutakhiran data pada level rukun tetangga;
4. Memutakhiran data pada level keluarga;
5. Memutakhiran data pada level warga;
6. Menganalisis data sesuai kaidah SDGs desa;
7. Merekomendasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai hasil analisis SDGs Desa.

Dengan ini bisa dikatakan akan sulit melaksanakan SDGs Desa jika tanpa ada partisipasi masyarakat di dalamnya dan hal ini yang menjadi faktor pentingnya pemahaman SDGs Desa di kalangan masyarakat bagi setiap desa terutama di Desa Ciburial. Adapun berdasarkan hasil penelitian, SDGs Desa ini sudah pernah dilaksanakan oleh Desa Ciburial pada tahun 2021 dengan capaian poin keseluruhannya yakni 63,31.

Capaian yang diperoleh Desa Ciburial ini belum menunjukkan pelaksanaan SDGs Desa yang sesungguhnya sebagaimana slogan yang terdapat pada SDGs Desa itu sendiri yakni *no one left behind* (melibatkan keseluruhan). Hasil wawancara menunjukkan pelaksanaan SDGs Desa pada tahun 2021 hanya melibatkan satu (1) RW saja dan hanya sebatas formalitas tuntutan dari pemerintah pusat. Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai SDGs Desa dan adanya pandemi covid-19 yang masih membatasi proses terlaksananya kegiatan. Terlebih lagi terdapat mandat dari Kemendesa untuk setiap desa melakukan SDGs Desa dengan waktu yang sudah ditentukan, sebagaimana tertera pada surat edaran Kemendesa PDTT RI Nomor

31/PRI.00/IV/2021 tentang Penegasan Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa, yang di dalamnya ada penegasan bahwa pelaksanaan harus selesai sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Keterbatasan waktu ini menjadi hambatan lain yang menyebabkan keterbatasan capaian SDGs Desa tahun 2021.

Perencanaan SDGs Desa di Desa Ciburial pada tahun 2022 dicanangkan akan mengoptimalkan keseluruhan daerah di Desa Ciburial sebagai bentuk penyempurnaan dari hasil sebelumnya yang belum optimal. Pihak pemerintah desa pun menyakini bahwa SDGs Desa dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Langkah awal pemerintah desa dalam merencanakan pelaksanaan SDGs Desa ialah melalui pendataan SDGs Desa. Keyakinan terlaksananya SDGs Desa di Desa Ciburial pada tahun 2022 ini didukung dari pergerakan yang dilakukan pemerintah desa yang mulai mengoptimalkan media sosial yang dimiliki pemerintah Desa Ciburial serta sosialisasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi mengenai SDGs Desa kepada masyarakat desa agar dapat menumbuhkan pemahaman dan menarik minat partisipasi di dalamnya dalam menunjang keberhasilan pencapaian SDGs Desa di Desa Ciburial.

Selain itu, pemerintah Desa Ciburial juga memberdayakan komunitas informasi masyarakat (KIM) untuk membantu tugas pemerintah desa dalam menyebarkan informasi mengenai SDGs Desa. Namun, seluruh anggota KIM masih dari jajaran perangkat Desa Ciburial sehingga pergerakan KIM itu sendiri menjadi terbatas, apalagi mengingat bahwa perangkat desa itu sendiri memiliki tugas pokok yang harus dikerjakan terlebih dahulu ketimbang mengurus KIM ini. Keterbatasan keanggotaan KIM ini sering kali membatasi ruang gerak mereka dalam mewujudkan SDGs Desa.

Berdasarkan pembahasan di atas, pemerintah desa meyakini bahwa partisipasi masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan SDGs Desa. Akan tetapi, partisipasi ini juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan SDGs Desa di Desa Ciburial. Hambatan yang ada antara lain sebagai berikut:

1. Secara umum partisipasi masyarakat di Desa Ciburial belum sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui secara pasti apa yang dimaksud SDGs Desa, tujuan serta manfaat dari SDGs Desa itu sendiri.
2. Keterbatasan jumlah anggaran yang tersedia. Penyebabnya adalah banyaknya program lain yang harus dijalankan membuat pengelolaan keuangan desa untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa ini menjadi minim.
3. Luas wilayah. Kondisi wilayah seperti *signal* yang belum merata dan kondisi dari setiap wilayah yang berbeda-beda akan menyulitkan dalam pelaksanaan SDGs Desa.
4. Kriteria yang diinginkan pemerintah Desa Ciburial dalam partisipasi SDGs Desa ini terbilang klasifikasi masyarakat yang sibuk, yang menjadikan sulit untuk ikut berpartisipasi dalam SDGs Desa yang dilaksanakan pemerintah Desa Ciburial.

Terlepas dari hambatan yang ada pemerintah desa akan terus berupaya agar keberhasilan pencapaian SDGs Desa dapat tetap terlaksana dan pemerintah desa tentunya menginginkan setiap masyarakat dapat berpartisipasi sebagaimana mestinya dengan memanfaatkan kader-kader pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah setempat.

B. Tingkat Partisipasi Pemerintah Desa Ciburial

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa dalam perencanaan ataupun pelaksanaan SDGs Desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di dalamnya, akan tetapi sebelum menuntut partisipasi kepada masyarakat desa, alangkah lebih baik jika pemerintah desa sudah lebih dahulu berpartisipasi serta menyiapkan kesiapannya dalam menunjang partisipasi masyarakat desa nantinya. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori dari Chapin dalam Sutami (2009) untuk menentukan penilaian dari tingkat partisipasi pemerintah Desa Ciburial berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Keanggotaan dalam organisasi/lembaga;
2. Kehadiran di dalam pertemuan;
3. Sumbangan/iuran yang diberikan;
4. Kegiatan yang diikuti dalam tahap program yang direncanakan; dan
5. Keaktifan dalam diskusi pada setiap pertemuan yang diadakan.

Penjelasan dari pembahasan ini nantinya dapat menjadi bahan tambahan/pendukung peneliti untuk melakukan analisis pada pembahasan berikutnya mengenai tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan teori tangga partisipasi Arnstein. Pada pembahasan teori Chapin ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Keanggotaan dalam organisasi/lembaga

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa seluruh perangkat Desa Ciburial yang saat ini bekerja atau pun terlibat di dalamnya seperti kelembagaan desa, petugas keamanan sampai petugas penjaga *fotocopy* merupakan warga asli Desa Ciburial dari berbagai wilayah RW dan dusun. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ciburial

dan Surat Keputusan Kelapa Desa Ciburial nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ciburial Tahun 2020. Bukan hanya itu saja, kelembagaan yang ada di Desa Ciburial seperti pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), badan usaha milik desa (BUMDes), lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) desa, Karang Tahura dan lain-lainnya memiliki anggota yang asli berasal dari masyarakat Desa Ciburial.

2. Kehadiran di dalam pertemuan

Dalam pembahasan kehadiran ini peneliti akan membaginya menjadi dua macam, yakni kehadiran terkait perangkat desa itu sendiri dan kehadiran masyarakat dalam suatu acara ataupun kegiatan.

a. Kehadiran Perangkat Desa

Terkait kehadiran perangkat desa, diketahui bahwa perangkat desa di Desa Ciburial merupakan perangkat desa yang sangat aktif hal ini dirasakan sendiri oleh peneliti berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti selama melaksanakan penelitian di Desa Ciburial. Aktif disini dapat dijelaskan seperti setiap diadakan acara formal ataupun non formal selalu menjadi bagian penting dalam acara tersebut. Terlebih lagi, kebiasaan positif yang dilakukan perangkat desa dan kelembagaan desa di setiap hari Jumat”, yakni selalu mengadakan kumpul bersama, berbincang-bincang menjalin silaturahmi yang membuat suasana kantor Desa Ciburial sangat hidup. Sementara pada hari-hari biasa pun kehadiran mereka tidak hanya sebatas di jam kerja saja, tetapi kadang kala berlanjut sampai malam untuk mengerjakan pekerjaan, membantu pekerjaan sesama perangkat desa, atau pun bersantai di kawasan kantor desa.

Kehadiran tidak sepenuhnya bisa dikatakan aktif karena masih ada salah satu kelembagaan desa yang tidak aktif, yakni karang taruna. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa karang taruna di Desa Ciburial ini tidak bekerja sebagaimana mestinya dan dikonfirmasi oleh pihak

perangkat desa bahwa sudah lama kurang aktif pergerakannya dan hal ini mempengaruhi juga terhadap perhimpunan kaum muda (pemuda) masyarakat desa di kelembagaan Desa Ciburial.

b. Kehadiran Masyarakat Desa

Terkait kehadiran masyarakat desa biasanya tergantung dari kegiatan dan tujuan penyelenggaraannya serta dari kepentingan masyarakatnya itu sendiri.

3. Sumbangan/iuran yang diberikan

Pemerintah desa tidak memberlakukan sumbangan ataupun iuran kepada setiap perangkat desa ataupun masyarakat terkecuali sumbangan kemanusiaan atau pun kebijakan yang diberlakukan di luar keputusan kepala desa. Sumbangan atau pun iuran muncul dari inisiatif setiap anggota secara sukarela dan hal ini sering terjadi dalam pertemuan nonformal seperti konsumsi dari hasil bumi dari setiap wilayah di Desa Ciburial. Hal ini sudah menjadi suatu budaya yang menurut peneliti merupakan budaya yang positif dan menggambarkan gotong royong masyarakat yang masih kuat.

4. Kegiatan yang diikuti dalam tahap program yang direncanakan

Perangkat desa di Desa Ciburial wajib untuk mengikuti rangkaian perencanaan dalam suatu program yang akan dijalankan pemerintah desa, jika hal ini membahas mengenai kegiatan yang diikuti oleh masyarakat desa tentunya ada banyak program yang dalam perencanaannya melibatkan kelembagaan desa dan masyarakat desa, di antaranya seperti: acara musyawarah desa, acara musyawarah perencanaan pembangunan desa, acara tahunan Ciburial festival.

5. Keaktifan dalam diskusi pada setiap pertemuan yang diadakan

Pertemuan diskusi yang diselenggarakan pemerintah Desa Ciburial ini tidak terlalu sering, biasanya dilakukan sebanyak 4 sampai 6 kali dalam 1 tahun. Dalam

keaktifan diskusi tidak semua aktif, namun bisa dibilang sebagian masyarakat aktif dalam diskusi yang diadakan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat desa terlibat sangat baik hanya saja belum semua masyarakat aktif dan aktifnya masyarakat tersebut biasanya ditentukan pada kepentingan masyarakatnya sendiri dan juga dari faktor pembawaan pemerintah desa untuk menarik keaktifan masyarakat desa di setiap pertemuannya.

Terkait perencanaan pelaksanaan SDGs Desa, adapun peran pemerintah Desa Ciburial dalam menarik partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pelaksanaan SDGs Desa pada tahun ini, salah satunya ialah dengan sosialisasi dan pembentukan tim POKJA pendataan SDGs Desa.

Sosialisasi terkait pembentukan tim POKJA ini tentunya tidak hanya dilakukan saat agenda tentang POKJA ini saja, akan tetapi sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti, sosialisasi dilakukan dalam berbagai pertemuan antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa serta masyarakat yang tentunya terdapat masyarakat desa sebagai peserta dalam pertemuan tersebut. Adapun teknis sosialisasi yang biasa dilakukan oleh pemerintah desa, ialah:

1. Dalam media sosial.

memberikan informasi seputar apa itu SDGs Desa, tujuan serta manfaatnya. Memberikan gambaran umum tentang SDGs Desa serta pentingnya SDGs Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

1. Dalam musyawarah

Pemerintah desa mengundang masyarakat untuk agenda tertentu dan menyelipkan informasi melalui tampilan *slide* khusus untuk memberikan informasi mengenai SDGs Desa.

2. Pelaksanaan pendataan SDGs Desa pada 1 RW di Desa Ciburial.

Terkait pelaksanaan SDGs Desa, pemerintah desa melakukan pertemuan mengenai sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan SDGs di salah satu RW yang ada di Desa Ciburial, lebih tepatnya pada RW 10. Akan tetapi pada pertemuan ini keterlibatan yang hadir baru dari kalangan pengurus RT dan RWnya saja. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang menjelaskan mengenai kehadiran masyarakat pada pertemuan tersebut.

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis 16 Juni tahun 2022
 Tempat : RW 10
 Acara : Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pendataan SDGs.

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	3	5
1	H.P. Rohma	Kp. Lardur II		
2	Dodi Tisnawan	Kp. Ciburial		
3	Sagor Sutisna	Kp. Purcah		
4	CAH YANA	Kp. Ciharegem		
5	IDEN CAH PADI	Kp. Ciharegem		
6	Tiar Lusfawati	Citapahan		
7	M. Reza Kurniawan	Antapani	Bid. Teknik STIA LAN BGG	
8	Leonard Andito	Coblong	-	
9	Indu Hari	Kp. Cipuhutan		

Gambar 8. Daftar Kehadiran SDGs Desa di RW 10

Pertemuan sosialisasi dan bimbingan teknis yang hanya dihadiri oleh pengurus RT dan RW ini didasari dari belum adanya partisipasi masyarakat yang ingin terlibat dalam perencanaan pelaksanaan SDGs Desa di Desa Ciburial. Belum adanya keterlibatan partisipasi masyarakat sebagaimana mestinya inilah yang menjadi suatu masalah tersendiri di Desa Ciburial sebagaimana yang disinggung pada sub bab sebelumnya pada poin hambatan.

Walaupun pemerintah desa sudah mengusahakan memberlakukan metode ini, akan tetapi tidak dipungkiri usaha yang sudah dilakukan pemerintah desa tidak selalu membuahkan hasil yang diinginkan, mengingat belum adanya partisipan yang ikut andil dalam SDGs Desa sesuai harapan yang diinginkan pemerintah Desa Ciburial. Maka dari itu diperlukannya strategi lain

ataupun strategi yang dapat menyokong metode ini agar dapat meningkatkan keterlibatan partisipasi masyarakat Desa Ciburial terkait perencanaan dalam pelaksanaan SDGs Desa.

C. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Ciburial

Pada pembahasan sebelumnya bisa dikatakan belum sepenuhnya mengaitkan partisipasi masyarakat Desa Ciburial, serta terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan SDGs Desa itu sendiri. Sementara pada bagian ini, akan menjelaskan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pelaksanaan SDGs Desa di Desa Ciburial dengan menggunakan teori partisipasi menurut Arnstein sebagai dasar ataupun bahan untuk menentukan strategi dalam peningkatan partisipasi.

Pada BAB II sudah dijelaskan cara untuk mengidentifikasi teori tingkat partisipasi Arnstein ini. Identifikasi tingkat partisipasi masyarakat di Desa Ciburial terhadap SDGs Desa dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian yang dilakukan serta menggabungkan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pelaksanaan SDGs Desa di Ciburial sebelumnya menunjukkan hasil yang belum optimal, baik di kalangan perangkat desa ataupun masyarakat desanya. Pelaksanaan SDGs Desa pada tahun 2021 yang belum menyeluruh, serta tidak ada tindak lanjut lebih terkait pelaksanaan SDGs Desa sebagaimana mestinya. pemerintah Desa Ciburial belum berhasil memberlakukan kualifikasi masyarakat yang dapat berpartisipasi pada pelaksanaan pendataan SDGs Desa, terbukti dengan tidak adanya keikutsertaan masyarakat yang sesuai kualifikasi. Maka dari itu, pemerintah Desa Ciburial baru melibatkan perangkat desa dan kepengurusan RT dan RW di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan tersebut masih tergolong pada tingkatan manipulasi, yaitu ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan mengenai manfaat dari SDGs Desa, serta kegiatan yang dilaksanakan masih terbilang dipaksakan.

Pada tahun 2022, pemerintah Desa Ciburial akan melaksanakan kembali SDGs Desa dengan capaian yang diinginkan ialah melibatkan keseluruhan wilayah dari yang sebelumnya hanya 1 RW saja. Pemerintah desa sudah mulai gencar dalam penyebaran informasi mengenai SDGs Desa melalui media yang dimiliki pemerintah desa seperti *instagram*, *youtube*, *websites* desa, dan lainnya. Adapun penyebaran informasi secara langsung yang dilakukan pemerintah desa, yakni sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan SDGs Desa yang diikuti secara langsung oleh peneliti bertepatan di wilayah RW 10. Pada pelaksanaannya yang menghadiri acara tersebut ternyata hanya perwakilan perangkat desa dan ketua RW 10 serta ketua-ketua RT yang ada di RW tersebut. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang hanya dihadiri oleh perangkat RT dan RW ini didasari dari kurangnya partisipasi masyarakat yang ingin terlibat dalam pelaksanaan SDGs Desa.

Terkait penyebaran informasi mengenai SDGs Desa, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Ciburial sebagai data untuk membuktikan apakah penyebaran informasi yang dilakukan sudah tersampaikan kepada masyarakat secara optimal ataupun belum. Hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap lima belas (15) narasumber masyarakat Desa Ciburial dengan rincian enam (6) pemuda dan sembilan (9) orang dewasa, sembilan (9) narasumber menyatakan belum mengetahui apa itu SDGs Desa serta narasumber tersebut jarang sekali melihat ataupun mengunjungi media sosial yang dimiliki pemerintah Desa Ciburial, sedangkan enam (6) narasumber yang mengetahui mengenai SDGs Desa merupakan pengurus RT dan RW.

Pengetahuan mereka tentang SDGs Desa pun masih terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui juga terkait penyebaran informasi, biasanya informasi diperoleh dari ketua RT setempat. Selain mewawancarai mengenai sosialisasi terkait SDGs Desa, peneliti mencoba mengulik mengenai jika pemerintah Desa Ciburial mengajak masyarakat desa secara langsung untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan SDGs Desa, lima (5) dari lima belas (15) narasumber tersebut menyatakan berminat untuk berpartisipasi, lima (5) narasumber yang berminat ini semuanya merupakan narasumber dari pemuda (kaum umur pelajar) Desa Ciburial yang tidak termasuk ke dalam kriteria yang diinginkan oleh pemerintah desa dalam petugas pendataan SDGs Desa. Untuk narasumber yang lainnya berasumsi memiliki kesibukan.

Pemerintah Desa Ciburial dalam mempersiapkan pendataan SDGs Desa belum melibatkan pemuda (kalangan umur pelajar) dikarenakan anggapan pemerintah desa bahwa pemuda biasanya akan sulit untuk memahami pengetahuan dan teknik pelaksanaan pendataan SDGs Desa nantinya. Selain itu, mereka dianggap belum memiliki kemampuan komunikasi ketika bersosialisasi kepada masyarakat desa, sehingga mereka belum dijadikan target yang diinginkan pemerintah Desa Ciburial untuk menjadi petugas pendataan. Dari penjabaran di atas dapat diketahui perbandingan teori tingkat partisipasi Arnstein dengan fakta dilapangannya, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Teori dan Fakta Lapangan Tingkat Partisipasi

N o.	Tingkat Partisipasi	Keterangan	Fakta Lapangan
1	Manipulasi	Permainan oleh pemerintah	Masih adanya keterlibatan masyarakat desa
2	Terapi	Sekedar agar	Masih terdapat masyarakat yang

		masyarakat tidak marah	sukarela untuk ikut berpartisipasi
3	Pemberitahuan	Sekedar pemberitahuan searah	Sedang gencar-gencarnya penyebaran informasi mengenai SDGs Desa melalui media sosial yang dimiliki Pemerintah Desa Ciburial agar masyarakat desa tertarik untuk ikut berpartisipasi
4	Konsultasi	Masyarakat didengar, tetapi tidak selalu dipakai sarannya	Baru perangkat RT/RW yang sudah melaksanakan Kegiatan pendataan SDGs Desa
5	Penetrasi	Saran masyarakat diterima tetapi tidak selalu dilaksanakan	Dari kegiatan yang baru melibatkan pengurus RT/RW belum ada inisiatif usulan ataupun ide untuk pelaksanaan pendataan tersebut
6	Kemitraan	Timbal balik dinegosiasikan	Belum adanya keikutsertaan masyarakat desa terhadap pendataan SDGs Desa
7	Pendelegasian	Masyarakat diberi kekuasaan	Karena belum adanya keikutsertaan masyarakat desa, kolaborasi antara pemerintah Desa Ciburial dan masyarakat desa belum terjadi
8	Kontrol Masyarakat	Sepenuhnya dikuasai masyarakat	Perencanaan dan pelaksanaan SDGs Desa masih dipegang oleh pemerintah Desa Ciburial

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan SDGs Desa dan pelaksanaan sosialisasi yang sudah dilakukan pada RW 10 masih tergolong minim akan partisipasi

masyarakat. Namun, kehadiran masyarakat desa masih ada dan dilakukan secara sukarela. Adapun banyaknya masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan ataupun pemahaman serta manfaat mengenai SDGs Desa. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat Desa Ciburial berdasarkan tangga partisipasi Arnstein termasuk ke dalam tingkatan pemberitahuan (*Informing*).

Tabel 6. Hasil Pengukuran Tangga Partisipasi Arnsterin

Level	Pengetahuan	Manfaat	Kehadiran
Pemberitahuan (<i>Informing</i>)	Tidak tahu	Tahu	Sukarela

D. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa Ciburial

Pada pembahasan penelitian ini merupakan tindaklanjut dari pembahasan sebelumnya mengenai SDGs Desa dan partisipasi masyarakat Desa Ciburial yang akan di analisis menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini akan menjadi bahan untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan SDGs Desa di Desa Ciburial untuk menunjang keberhasilan pelaksanaannya pada tahun ini. Teknik analisis SWOT ini digunakan untuk mengetahui faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Faktor Internal

a. Kekuatan

1. Sumber daya manusia pemerintah Desa Ciburial yang aktif
2. Pemahaman mengenai SDGs Desa di kalangan perangkat Desa Ciburial cukup baik
3. Citra pemerintah desa yang baik di mata masyarakat

4. Interaksi yang kuat antara pemerintah desa dengan masyarakat desa

5. Terdapat landasan hukum

b. Kelemahan

1. Karang taruna yang tidak aktif
2. Anggaran yang terbatas
3. *Jobdesk* perangkat desa yang padat
4. Cangkupan penyebaran informasi yang belum menyentuh seluruh masyarakat desa
5. Masih meyakini bahwa pemuda (pelajar) belum bisa untuk dijadikan pondasi dalam suatu kegiatan ataupun program

B. Faktor Eksternal

a. Peluang

1. Keaktifan perangkat RT dan RW di Desa Ciburial
2. Mudah menjalin kemitraan
3. Memiliki media sosial yang aktif
4. Terdapat kelompok informasi masyarakat (KIM)

b. Ancaman

1. Berkurangnya minat pemuda
2. Pemahaman di kalangan masyarakat tentang SDGs Desa masih kurang
3. Belum seluruh kalangan masyarakat desa mengetahui media sosial yang dimiliki pemerintah Desa Ciburial
4. Kondisi geografis mempengaruhi penyebaran informasi

Setelah identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap partisipasi dalam SDGs Desa, langkah selanjutnya adalah menggunakan identifikasi tersebut untuk menyusun strategi meningkatkan partisipasi masyarakat pada SDGs Desa. Penyusunan strategi menggunakan strategi TOWS yang dilakukan dengan mengkombinasikan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi tersebut dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7. Hasil Analisis Faktor Internal dan Eksternal Terkait Partisipasi Pada SDGs Desa

Internal	Kekuatan	Kelemahan
	- SDM pemerintah desa yang aktif	- Karang taruna yang tidak aktif
	- Pemahaman mengenai SDGs di kalangan Perangkat desa cukup baik	- Anggaran yang terbatas
	- Citra pemerintah desa yang baik di mata masyarakat	- <i>Jobdesk</i> perangkat desa yang padat
	- Interaksi yang kuat antara pemerintah desa dengan masyarakat	- Cangkupan penyebaran informasi yang belum menyentuh seluruh masyarakat
	- Terdapat landasan hukum	- Masih meyakini bahwa pemuda (pelajar) belum bisa dijadikan pondasi dalam suatu kegiatan ataupun program
Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
Peluang		
- Keaktifan perangkat RT/RW	- Mengoptimalkan keaktifan yang dimiliki perangkat RT/RW dalam penerapan pemahaman SDGs Desa	- Mengoptimalkan KIM untuk mengganti karang taruna yang tidak aktif dalam peningkatan partisipasi masyarakat
- Mudah menjalin kemitraan	- Menjalin kemitraan untuk memperkuat interaksi dengan masyarakat	- Menjalin kemitraan untuk menghemat pengeluaran SDGs Desa
- Memiliki media sosial yang aktif	- Mengoptimalkan media sosial yang dimiliki dalam penyebaran informasi mengenai SDGs Desa	- Mengoptimalkan perangkat RT/RW untuk mengatasi kepadatan <i>jobdesk</i> perangkat desa

Ancaman	Strategi ST	Strategi WT
- Berkurangnya minat pemuda	- Mengoptimalkan kelembagaan desa untuk merumpun minat pemuda dan media sosial yang dimiliki, serta penyebaran pemahaman tentang SDGs Desa	- Mengoptimalkan SDM yang tersedia, melakukan penyebaran informasi mengenai media sosial desa dan SDGs Desa secara bertahap dimulai dari wilayah terdekat. (strategi untuk mengendalikan kerugian agar tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan)
- Pemahaman di kalangan masyarakat tentang SDGs Desa masih kurang	- Mengoptimalkan interaksi kepada masyarakat terkait pemahaman SDGs Desa di wilayah yang sulit	
- Belum seluruhnya masyarakat mengetahui media sosial yang dimiliki desa	- Mengoptimalkan interaksi kepada masyarakat terkait pemahaman SDGs Desa di wilayah yang sulit	
- Kondisi geografis mempengaruhi penyebaran informasi	- Mengoptimalkan informasi melalui media sosial	

Setelah menemukan strategi dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan SDGs Desa di Desa Ciburial, adapun langkah selanjutnya ialah menganalisis menggunakan matrik IFAS dan EFAS untuk memberikan bobot, *rating*, dan nilai skor. Pembobotan diberikan berdasarkan dampak yang mungkin ditimbulkan pada keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat, skala nilai mulai dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting). Untuk *rating* diberikan berdasarkan tingkat pengaruh masing-masing isu strategis terhadap peningkatan implementasi kebijakan, dengan skala 1-4 yang mana nilai 1 (mempunyai pengaruh

sangat bagus); 2 (mempunyai pengaruh yang bagus); 3 (mempunyai pengaruh yang cukup); 4 (mempunyai pengaruh yang kecil).

Berdasarkan hasil analisis mengenai lingkungan internal, peneliti dapat menyimpulkan beberapa isu strategis yang menjadi kekuatan dan kelemahan pemerintah Desa Ciburial terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan SDGs Desa pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. IFAS

No	Isu Strategis	Bobot (A)	Rating (B)	Skor (Ax B)
Kekuatan				
1	SDM pemerintahan desa yang aktif	0,11	1	0,11
2	Pemahaman mengenai SDGs di kalangan perangkat desa cukup baik	0,10	2	0,20
3	Citra pemerintah desa yang baik di mata masyarakat	0,09	3	0,27
4	Interaksi yang kuat antara pemerintah desa dengan masyarakat	0,10	1	0,10
5	Terdapat landasan hukum	0,10	3	0,30
Total Kekuatan		0,50		0,98
Kelemahan				
1	Karang taruna yang tidak aktif	0,12	2	0,48
2	Anggaran yang terbatas	0,10	2	0,20
3	Jobdesk perangkat desa yang padat	0,09	2	0,18
4	Cangkupan penyebaran informasi yang belum menyentuh seluruh masyarakat	0,10	2	0,20
5	Masih meyakini bahwa kaum muda (pelajar) belum bisa untuk dijadikan pondasi dalam suatu kegiatan ataupun program	0,09	2	0,18
Total Kelemahan		0,50		1,24

Adapun hasil analisis lingkungan eksternal, peneliti dapat menyimpulkan beberapa isu strategis yang menjadi kekuatan dan kelemahan pemerintah Desa Ciburial terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan SDGs Desa pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. EFAS

No	Isu Strategis	Bobot (A)	Rating (B)	Skor (Ax B)
Peluang				
1	Keaktifan perangkat RT/RW	0,10	2	0,20
2	Mudah menjalin kemitraan	0,15	2	0,30
3	Memiliki media sosial yang aktif	0,15	2	0,30
4	Terdapat kelompok informasi masyarakat (KIM)	0,15	1	0,15
Total Peluang		0,55		0,95
Ancaman				
1	Berkurangnya minat pemuda	0,12	1	0,12
2	Pemahaman kalangan masyarakat tentang SDGs masih kurang	0,12	1	0,12
3	Belum seluruhnya kalangan masyarakat mengetahui media sosial yang dimiliki desa	0,11	2	0,22
4	kondisi geografis mempengaruhi penyebaran informasi	0,10	3	0,30
Total Ancaman		0,45		0,76

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai analisis matrik IFAS dan EFAS, dapat dirumuskan kuadran diagram cartesius. Penentuan kuadran dalam diagram cartesius dimaksudkan untuk menentukan keputusan strategis. Dalam membuat diagram cartesius yang perlu dilakukan ialah melakukan penghitungan terhadap titik koordinat sumbu X yang merupakan hasil IFAS dengan total skor kekuatan ialah 0,98 dan total skor kelemahan ialah 1,24.

$$\text{Sumbu X} = \frac{\text{Kekuatan} - \text{Kelemahan}}{2}$$

$$X = \frac{0,98 - 1,24}{2} = \frac{-0,26}{2}$$

$$X = -0,13$$

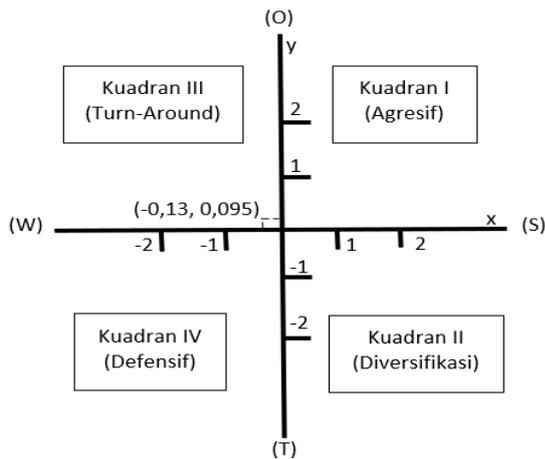
Kemudian melakukan perhitungan terhadap titik koordinat melintang Y dengan total skor peluang 0,95 dan total skor ancaman adalah 0,76.

$$\text{Sumbu Y} = \frac{\text{Peluang} - \text{Ancaman}}{2}$$

$$Y = \frac{0,95 - 0,75}{2} = \frac{0,19}{2}$$

$$Y = 0,095$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat dibuat diagram cartesius pada gambar di bawah ini:



Gambar 9. Diagram SWOT

Sesuai hasil diagram SWOT yang telah dibuat, diketahui bahwa kuadran strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan SDGs Desa di Desa Ciburial masuk pada kuadran III (*Turn-Around*). Kuadran III ini merupakan posisi yang memiliki peluang akan tetapi harus menghadapi kelemahan pada internal. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dari beberapa strategi yang dirumuskan, strategi WO lebih berpeluang berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait perencanaan dan pelaksanaan SDGs Desa di Desa Ciburial.

Strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT dan analisis IFAS dan EFAS yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan pada kuadran III yang berarti dapat menerapkan strategi WO, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan KIM untuk mengganti karang taruna yang tidak aktif dalam peningkatan partisipasi masyarakat.

Pada konteks ini berdasarkan fungsi KIM ini sendiri, peneliti menyakini bahwa potensi KIM dapat merumpun beberapa kalangan masyarakat yang berguna untuk menarik minat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan/program yang di selenggarakan pemerintah Desa

sebagaimana fungsi karang taruna di Desa Ciburial ini.

2. Menjalin kemitraan untuk menghemat pengeluaran SDGs Desa.

Berdasarkan anggaran yang dimiliki pemerintah Desa Ciburial terhadap pelaksanaan SDGs Desa, melakukan kemitraan dapat menghemat pengeluaran yang dilakukan pemerintah Desa terkait pemberian pemahaman mengenai SDGs Desa di kalangan masyarakat, seperti menjalin kerja sama kepada Kemeterian Desa, untuk memberikan sosialisasi mengenai SDGs Desa kepada masyarakat desa yang wilayahnya sulit untuk mengakses informasi secara *online* (dari media sosial yang dimiliki pemerintah Desa Ciburial).

3. Mengoptimalkan perangkat RT/RW untuk mengatasi kepadatan *jobdesk* perangkat desa.

Dalam hal ini berkaitan dengan poin satu (1), dengan memberdayakan RT/RW dapat memperingan pekerjaan perangkat desa dalam penyebaran informasi ataupun aspirasi terkait SDGs Desa di kalangan masyarakat desa, terutama di wilayah masing-masing RT/RW tersebut.

4. Memberdayakan KIM untuk memperluas cakupan penyebaran informasi.

Keterbatasan ruang gerak yang dimiliki perangkat desa terhadap penyebaran informasi kepada masyarakat dapat dioptimalkan melalui berbagai kelembagaan yang dimiliki pemerintah Desa Ciburial, salah satunya KIM.

5. Mengoptimalkan media sosial yang dimiliki untuk menarik minat partisipasi pemuda.

Strategi ini berkaitan dengan poin tiga (3), yaitu pemerintah Desa Ciburial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi berupa ide, gagasan, ataupun berpartisipasi terhadap penggunaan media sosial yang dimiliki pemerintah Desa Ciburial.

Langkah ini dapat menjadi permulaan keterlibatan partisipasi kaum muda di kalangan pemerintah Desa Ciburial, terutama karena ketertarikan pemuda terhadap eksistensi di media sosial sangat tinggi di akhir-akhir ini.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Ciburial memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ataupun meminimalisasi kelemahan dan ancaman untuk meningkatkan partisipasi di kalangan masyarakat desa untuk merealisasikan SDGs Desa. Lebih spesifik lagi, peneliti merekomendasikan perencanaan strategis peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan SDGs Desa, sebagai berikut:

Tabel 10. Perencanaan Strategis Partisipasi Masyarakat

Tujuan	Identifikasi	Solusi PM
Menjalin kemitraan untuk menghemat anggaran yang diperlukan	Memanfaatkan relasi yang dimiliki untuk mengembangkan inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan SDGs Desa	-Membuat proposal/ permohonan pendampingan -pelaksanaan SDGs Desa terhadap lembaga pemerintahan / non pemerintahan -Penjadwalan agenda diskusi terbuka
Menjalin hubungan baik sebelum kerjasama dilakukan	Mengikutsertakan masyarakat desa terhadap konten informasi mengenai SDGs Desa melalui KIM	-Mensinergikan pengembangan konsep bersama-sama dengan aksi lapangan yang nyata -Membuka <i>volunteer</i> keanggotaan ataupun partisipan tenaga KIM
Menumbuhkan kembali pemuda desa	Mengkodinir para pemuda melalui KIM, serta	-Membuka keanggotaan KIM untuk para pemuda

di Desa Ciburial	membenahi karang taruna desa
------------------	------------------------------

Perencanaan strategis partisipasi masyarakat yang peneliti buat merupakan konsep yang mana dengan dorongan kecil dari pemerintah Desa Ciburial dapat memberikan dampak yang besar dalam pertumbuhan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan SDGs Desa di Desa Ciburial. Konsep ini dapat dijabarkan, sebagai berikut:

1. Membuka/menjalin kemitraan dalam perencanaan SDGs Desa, gagasan dan inovasi untuk menarik minat partisipasi masyarakat desa akan lebih banyak tercipta dan lebih berpeluang dapat terealisasikan yang dipengaruhi oleh faktor SDM dan anggaran yang dimiliki kemitraan tersebut.
2. Dalam pembelajaran, hal yang menyenangkan akan lebih diterima dan digemari oleh murid, hal ini dapat diterapkan dalam pembuatan konten mengingat pembuatan konten ini merupakan hal yang sedang gaya dan digemari banyak orang, dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan konten secara tidak langsung akan memberikan pemahaman mengenai SDGs itu sendiri dan menumbuhkan rasa ketertarikan untuk terlibat lebih lanjut pada SDGs itu sendiri.
3. Memberikan wadah sementara kepada para pemuda sebagai upaya mempertahankan kepemudaan di Desa Ciburial agar para pemuda dapat terus ada dan Desa Ciburial tidak kehilangan kelembagaan yang merumpun para pemuda itu sendiri sambil membenahi karang taruna yang tidak aktif yang seharusnya jadi wadah para pemuda tersebut.

Peneliti meyakini bahwa perencanaan strategis ini dapat mempengaruhi tingkatan partisipasi masyarakat desa terhadap perencanaan dan pelaksanaan SDGs Desa

di Desa Ciburial. Ketika masyarakat desa sudah mulai tertarik dan ikut andil dengan SDGs Desa, serta pemerintah desa memiliki wadah untuk menampung ketertarikan tersebut tidak dipungkiri tingkat partisipasi berdasarkan tangga partisipasi Arnstein yang awalnya baru pada tingkatan pemberitahuan (*informing*) bisa menjadi penentraman (*placation*), bahkan bisa menjadi kemitraan (*partnership*). Hal inilah yang dapat mensukseskan program SDGs Desa di Desa Ciburial dan juga bisa menjadi gerbang awal untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah Desa Ciburial untuk mendapatkan partisipasi masyarakat guna mensukseskan program-program nantinya yang dikerjakan oleh pemerintah Desa Ciburial.

Adapun beberapa argumentasi yang peneliti buat dalam bentuk simpulan dan saran yang akan memperkuat strategi yang sudah dibuat di pembahasan ini, yang akan dibahas pada bagian penutup.

KESIMPULAN

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa merupakan program yang bertujuan untuk percepatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada tingkatan desa yang masuk dalam arahan mengenai prioritas penggunaan dana desa. Dalam penerapannya, SDGs Desa itu sendiri tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat di dalamnya karena partisipasi masyarakat ini dapat dikaitkan dengan maksud dan tujuan yang ada pada buku standar operasional prosedur pemutakhiran data SDGs Desa yang mana merupakan salah satu rangkaian dari perencanaan SDGs Desa dan mencerminkan pemberdayaan masyarakat berbasis data. Hal inilah yang membuat SDGs Desa membutuhkan partisipasi masyarakat di dalamnya serta pentingnya pemahaman SDGs Desa di kalangan masyarakat Desa Ciburial.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan

SDGs Desa di Desa Ciburial pada pembahasan yang sudah dijabarkan di bagian sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa di Desa Ciburial cukup baik untuk kegiatan/program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Ciburial. Akan tetapi, dalam perencanaan dan pelaksanaan SDGs Desa, tingkat partisipasi masih minim dan tergolong ke dalam tingkatan pemberitahuan (*informing*). Pada tingkat ini, mayoritas masyarakat desa belum memiliki pengetahuan mengenai SDGs Desa baik itu mengenai manfaat maupun pentingnya pelaksanaan SDGs Desa di wilayah tersebut. Belum terlihat adanya keterlibatan partisipasi sebagaimana mestinya pada SDGs Desa di Desa Ciburial. Meskipun demikian, kehadiran masyarakat desa masih terasa mengingat masih ada masyarakat desa yang mau berpartisipasi secara sukarela.
2. Dalam perencanaan SDGs Desa pada tahun 2022, pemerintah Desa Ciburial mempersiapkan kegiatan pendataan SDGs Desa untuk memperoleh partisipasi sebagai relawan. Persiapan tersebut meliputi penyusunan POKJA sebagai dasar kebijakan pelaksanaan serta melakukan sosialisasi mengenai SDGs Desa mau itu secara langsung (menyisipkan informasi mengenai SDGs Desa di setiap pertemuan yang dihadiri masyarakat desa) ataupun secara tidak langsung (melalui media sosial yang dimiliki pemerintah Desa Ciburial). Meskipun demikian, persiapan yang sudah dilakukan pemerintah Desa Ciburial ini belum berhasil dengan baik, mengingat tidak adanya keikutsertaan masyarakat Desa Ciburial yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan pemerintah Desa Ciburial dalam pelaksanaan SDGs Desa di Desa Ciburial.

3. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dapat diketahui berbagai informasi yang dapat diolah di pembahasan hasil penelitian dalam bentuk analisis SWOT yang nantinya akan menjadi bahan untuk merumuskan strategi dalam peningkatan partisipasi masyarakat menggunakan strategi TOWS. Strategi TOWS dilakukan dengan mengkombinasikan antara kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) yang dimiliki Desa Ciburial.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Ciburial memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ataupun meminimalisasi kelemahan dan ancaman untuk meningkatkan partisipasi di kalangan masyarakat untuk merealisasikan SDGs Desa. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam SDGs Desa tidak terlepas dari penyebaran informasi mengenai SDGs Desa. Jika masyarakat memahami apa itu SDGs Desa, ketertarikan mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap keikutsertaan mereka dalam kegiatan SDGs Desa itu sendiri, salah satunya ialah keikutsertaan menjadi relawan pendataan SDGs Desa dan dukungan dalam mensukseskan pendataan SDGs Desa dengan cara memberikan data yang jujur sehingga data yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan SDGs Desa.

SARAN

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Desa Ciburial, terdapat beberapa usulan saran yang dapat diajukan untuk mendukung penelitian yang telah dilakukan, di antaranya:

1. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian mengenai

partisipasi masyarakat di Desa Ciburial dengan metode lainnya ataupun melanjutkan pembahasan berdasarkan olahan yang sudah ada pada penelitian ini;

2. Bagi pemerintah Desa Ciburial, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan yang tidak aktif seperti karang taruna, agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya serta meningkatkan kinerjanya dalam menarik minat partisipasi pemuda (pelajar) pada pelaksanaan program ataupun kegiatan yang diberlakukan pemerintah Desa Ciburial.
3. Diharapkan pemerintah Desa Ciburial dapat membuka pandangan baru terhadap pemuda (pelajar), dan mulai memberdayakan pemuda tersebut melalui kelembagaan yang ada di pemerintahan Desa Ciburial agar eksistensi pemerintah Desa Ciburial lebih diketahui oleh para pemuda yang ada di Desa Ciburial.
4. Pembuatan notulensi di setiap ide ataupun gagasan yang tercipta serta yang sudah dilakukan dan hasilnya agar dapat menjadi gambaran penting dalam merumuskan ulang metode yang tepat untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan sesuai konteks ide ataupun gagasan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Jurnal ini berhasil dibuat berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Selama proses penelitian yang dilakukan, penulis sangat bersyukur karena bisa mendapatkan berbagai pengalaman dan pengetahuan baru. Keberhasilan penulis membuat jurnal ini tidak luput dari bantuan, dukungan, dan motivasi berbagai pihak yang terlibat. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal:

- Arnstein, Sherry, R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 216-224.
- Bachtiar S., B. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 46-26.
- Citra, P., Juli, S. & Siti, A. (2018). Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Bersih di Kelurahan Cihaurgelis. *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*, 1-6.
- Iraawan, A., Sunandar, E. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*. 196-212.
- Isma, R., Fredian, T., N. (2011). Partisipasi Masyarakat dan *Stakeholder* dalam Penyelenggaraan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. 1978-4333.
- M., Patiung. (2019). Analisis Permasalahan, Isu Strategis dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*. 1412-1816.
- Rahmawati, M., Hastuti. (2019). Analisis SWOT dan TOWS Sebagai Landasan dalam Perencanaan Strategis Sistem Informasi Akutansi Persediaan di Kabupaten Bandung Barat. *Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS)*, 2775-2003.
- Yayuk, T., W., Asnawi, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dan

Keberlanjutan Program Gerak Bersemi Di Griya Lestari Munthe Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. 472-482.

Buku:

- A. Halim, Iskandar. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- A., Muri, Yusuf. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Adrian, Tawai., Muh., Yusuf. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Kediri: Literacy Institute.
- Alfred, D., Chandler, Jr. (1962). *Strategy and Structure: Chapters in The History of The Industrial Enterprise*. Cambridge Mass: MIT Press.
- Atika, Dzulkhijiana. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang (Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro)*. Diperoleh dari <http://eprints.undip.ac.id/>
- Dewi, K., Yudi, R., Agus, S., & Rira, N. (2021). *Teknik Analisa*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- M., Iqbal, Bahua. (2018). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan*

- Masyarakat.* Gorontalo: Ideas Publishing.
- Pebrian Perdana (2017). *Implementation Of Good Governance Principles (Case Studies in Structural Echelon II Appointment Process in the City of Bandar Lampung Government)*. *Jurnal Inovasi Pembangunan*, Volume 05 No. 1 (81).
- Rahardjo, Adisasmita. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan. (2013). *Perencanaan Partisipatif: Perspektif Kesejahteraan Masyarakat*. Surabaya: CV. R.A.De.Rozarie.
- Riyanto, S. Azis, M. N. L. Putera, A. R. (2021). *Analisis SWOT sebagai penyusunan Strategi Organisasi*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Mandiri.
- Salim., Syahrums (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Skripsi/ Dissertation/Thesis, dipublikasikan:**
- Sutami. 2009. *Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Marunda Jakarta Utara* (Program Pasca Sarjana Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro).
- Diperoleh dari <http://eprints.undip.ac.id/>
- Timothy, D., Sisk. (2002). *Demokrasi Di Tingkat Lokal*. Jakarta: Aameepro.
- Internet:**
- Siayi. (2022, April). *Website Desa Ciburial*. Retrieved from <https://ciburial.desa.id/>
- Infid. (2022, April). *Sustainable Development Goals* Retrieved from <https://www.sdg2030indonesia.org/>
- Aturan:**
- Kemendesa PDPT. 2020. *Permendesa PDPT RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Departemen Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Kemendesa PDPT. 2022. *Permendesa PDPT RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. Jakarta: Departemen Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- JDIH. 2017. *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.